



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

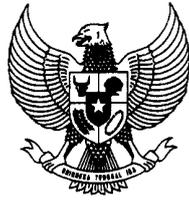
**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Penyusunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Progsun Kemen PPPA Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2024 ditetapkan sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Progsun Kemen PPPA Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat daftar:

- a. Rancangan Peraturan Presiden;
- b. Rancangan Peraturan Menteri;
- c. Draf Nota Kesepahaman; dan
- d. Draf Perjanjian Kerja sama,

yang akan disusun dan diselesaikan di tahun 2024.

KEEMPAT : Dalam hal daftar sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan luncuran tahun 2023, harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2024.

KELIMA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

DAFTAR PROGSUN KEMEN PPPA TAHUN 2024

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER						
1.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	a. Sebagai dasar hukum evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. b. Sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan pengarusutamaan gender.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>c. Sebagai bahan advokasi kepada pemangku kebijakan.</p> <p>d. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi sekaligus memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya.</p>				
2.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	<p>a. Ketiadaan pedoman teknis mengenai Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) berimplikasi pada kekosongan hukum dalam memastikan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan peningkatan dan pengembangan LPLPP agar tercapai pemberdayaan perempuan yang</p>	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	<p>1) Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum</p> <p>2) Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi</p> <p>3) Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya</p> <p>4) Asisten Deputi Perumusan Kebijakan</p>	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		terstandar, konsisten, serta berkualitas. b. Peraturan Menteri ini merupakan dasar hukum dari pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat nasional, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, serta standardisasi LPLPP.		Perlindungan Hak Perempuan		
3.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan	Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi: a. sosialisasi dan advokasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek);	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	1) Kementerian Ketenagakerjaan 2) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perempuan dan Perlindungan Anak	b. pemberdayaan ekonomi dan sosial kepada Kemen PPPA dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek); c. penelitian dan pengembangan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era digital; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.		3) Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang		
4.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Program kerja sama antara Kemen PPPA dan PT. PNM mendukung prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta sesuai dengan sasaran program Kemen PPPA yaitu meningkatkan kualitas	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	1) Deputi Bidang Kesetaraan Gender 2) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak 3) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. b. Kerja sama Kemen PPPA dengan PT. PNM tidak hanya memperluas akses pembiayaan kepada perempuan rentan dan prasejahtera, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden RI atas 5 (lima) prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.				
5.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan <i>Microsave Consulting</i> tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Ekonomi dan	a. Pelaksanaan penelitian untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan ekonomi perempuan terkait inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2) Dunia Usaha	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Inklusi Keuangan Digital	<p>b. Pengolahan, analisis, dan penyediaan data untuk praktik terbaik kepemimpinan dan kesetaraan gender di dunia usaha.</p> <p>c. Pengembangan produk pengetahuan dan diseminasi informasi terkait dengan pelaksanaan program penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan baik di sektor publik dan privat.</p>				
6.	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan dan Kemen PPPA tentang Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender	<p>a. Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender bagi Pusat Investasi Pemerintah beserta perangkat pendukungnya.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pendamping dan pelaku usaha ultra mikro dan mikro yang terdapat di penyalur,</p>	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	1) Kementerian Keuangan 2) PT. PNM Persero	2024	Perpanjangan dari Perjanjian Kerja Sama yang akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2024



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Melalui Pembiayaan Ultra Mikro	meliputi 5 (lima) isu prioritas Kemen PPPA. c. Pertukaran data terkait pelaku usaha ultra mikro dan mikro. d. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi.				
7.	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian PPPA dengan PT. Tokopedia tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberian dukungan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya yang terkait dengan 5 (lima) isu prioritas Kemen PPPA.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2) Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK						
8.	Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak	Akan memayungi seluruh standardisasi layanan pemenuhan hak anak di daerah, antara lain layanan: a. Standardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA); b. Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); c. Standardisasi <i>Day Care</i> Ramah Anak; d. Standardisasi Sekolah Ramah Anak (SRA); dan e. Standardisasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	1) Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak 2) Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan 3) Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan 4) Seluruh pemerintah daerah provinsi	2024	Luncuran tahun 2023
9.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pembentukan	a. Untuk mekanisme pembentukan dan penguatan Provinsi Layak Anak bagi	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan	1) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	dan Penguatan Provinsi Layak Anak	pemerintah daerah provinsi, legislatif, dan yudikatif di tingkat provinsi. b. Meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak. c. Meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam membentuk dan menguatkan Provinsi Layak Anak untuk pengelolaan sumber daya.	Pemenuhan Hak Anak	2) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak		
10.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak	Untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam berpartisipasi dan menyampaikan pandangan serta sarana bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	1) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 2) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN						
11.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana	Kejadian bencana berdampak signifikan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya terlebih bagi mereka yang mengalami kerentanan berlapis seperti kelompok ekonomi rendah, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam situasi darurat mereka berisiko mengalami kekerasan berbasis gender. Perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sering tersisihkan dalam penerima bantuan, mengalami diskriminasi, dan lain-lain.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	1) Kementerian Dalam Negeri 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3) Kepolisian Negara 4) Kementerian Kesehatan 5) Kementerian Sosial 6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 7) Tentara Nasional Indonesia	2024	Luncuran tahun 2023
12.	Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri, Kemen PPPA, Kementerian	Diperlukan pertukaran data dan informasi serta penyusunan prosedur untuk melaksanakan upaya penanganan kasus dan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja	1) Kementerian Luar Negeri	2024	Luncuran tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri	pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri yang terindikasi atau menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.	dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3) Kementerian Sosial 4) Kementerian Ketenagakerjaan 5) Kepolisian Negara Republik Indonesia 6) Kejaksaan Republik Indonesia 7) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 8) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
13.	Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Universitas Padjajaran tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Berdasarkan data dari survei tahun 2020, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dimana 27% (dua puluh tujuh persen) dari aduan terjadi di universitas, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di universitas.	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	1) Universitas Padjajaran 2) Seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2024	Usulan baru
14.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kemen PPPA membutuhkan sinergi dengan Kopolnas sesuai dengan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara RI untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Kepolisian Negara RI.	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Kopolnas	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
15.	Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Grab Teknologi Indonesia tentang Peningkatan Manfaat Sosial dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Grab Teknologi Indonesia mendukung pelaksanaan kegiatan khususnya Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan dalam perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual.	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	1) PT. Grab Teknologi Indonesia 2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3) Kementerian Dalam Negeri 4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5) Kepolisian Negara RI 6) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 7) Forum Pengada Layanan bagi	2024	Perpanjangan dari Perjanjian Kerja Sama yang akan berakhir pada tanggal 25 September 2024



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Perempuan Korban Kekerasan 8) Seluruh unit kerja di lingkungan Kemen PPPA		
16.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Lembaga Wahid tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan di Desa Damai	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Wahid mendukung kegiatan Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan terkait perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial.	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan	1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2) Kementerian Dalam Negeri 3) Kepolisian RI 4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 5) UN Women	2024	Perpanjangan dari Perjanjian Kerja Sama yang akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2024



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
17.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan	Regulasi terkait teknologi dan informasi elektronik serta dampaknya secara umum tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan, namun tidak menysasar secara langsung kepada upaya perlindungan anak di ranah dalam jaringan (daring). Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan nasional yang komperhensif, bersifat lintas kementerian/lembaga dan sektor, terencana, terukur, dan berkesinambungan.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2) Kementerian Dalam Negeri 3) Kementerian Hukum dan HAM 4) Kementerian Sekretariat Negara 5) Kementerian Agama 6) Kementerian Kesehatan 7) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	2024	Luncuran tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Tertinggal, dan Transmigrasi 8) Kementerian Komunikasi dan Informatika 9) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 10) Kementerian Sosial 11) Mahkamah Agung 12) Kepolisian Negara RI		
18.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Dalam rangka meningkatkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, perlu diatur secara komprehensif upaya pencegahan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Agama, 2) Kementerian Kesehatan, 3) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,	2024	Luncuran tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		dan penanganannya melalui suatu Peraturan Menteri PPPA.		Riset, dan Teknologi 4) Kementerian Sosial		
19.	Peraturan Menteri PPPA tentang Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	Sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan layanan yang menerapkan prinsip perlindungan anak melalui penguatan dan pengembangan Lembaga/Unit Perlindungan Khusus Anak menjadi Lembaga/Unit Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) dalam mewujudkan kabupaten/Kota Layak Anak.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) 2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 3) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) 4) Lembaga yang menangani perlindungan dan pengasuhan anak dengan disabilitas 5) Lembaga rehabilitasi yang	2024	Luncuran tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				melakukan fungsi perlindungan dan pengasuhan anak swasta (LSM) 6) Lembaga pemerintah yang menangani anak korban NAPZA 7) Unit layanan penanganan kasus di satuan pendidikan 8) Unit layanan penanganan kasus kesehatan		
20.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan	Menggabungkan amanat Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	1) Kementerian Hukum dan HAM 2) Kementerian Sekretariat Negara 3) Mahkamah Agung 4) Kepolisian Negara RI	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO DATA DAN INFORMASI						
21.	Peraturan Menteri PPPA tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Biro Data dan Informasi	Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA	2024	Usulan baru
22.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Sinergi data dan pemanfaatan sistem pendokumentasian dalam penyusunan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan.	Biro Data dan Informasi	1) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2) Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan 3) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 4) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan					
23.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kemen PPPA	Tanda tangan elektronik (<i>electronic signature</i>) dengan melakukan tanda tangan elektronik dimanapun dan kapanpun diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan.	Biro Data dan Informasi	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	2024	Usulan baru
24.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan	Pemanfaatan verifikasi Nomor Induk Kependudukan diperlukan untuk kebutuhan pencatatan dan pelaporan pada Aplikasi Sistem Informasi <i>Online</i> Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).	Biro Data dan Informasi	Kementerian Dalam Negeri	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
25.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kepolisian Negara RI tentang Berbagi Data Kekerasan	Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kepolisian Negara RI Nomor B-72/MOU/KPPPA/08/2019 dan Nomor B/99/VIII/2019 tentang Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Biro Data dan Informasi	Kepolisian Negara RI	2024	Usulan baru

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
26.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2021 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024	Berdasarkan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024, kementerian yang	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		telah menyusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi harus menyesuaikan dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tersebut.				
27.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemen PPPA	Adanya perubahan kebijakan tentang pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja sehingga perlu dilakukan perubahan atas	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2020 tersebut.				
28.	Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Sehingga pemerintah pusat perlu mengalokasikan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan dana dan mencapai target prioritas nasional bidang perlindungan perempuan dan anak.	Biro Perencanaan dan Keuangan	1) Kementerian Keuangan 2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3) Kementerian Dalam Negeri 4) Dinas yang menyelenggarakan urusan PPPA di daerah provinsi dan kabupaten/kota 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan	2024	Usulan Baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di provinsi dan kabupaten/kota		

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT						
29.	Peraturan Menteri PPPA tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kemen PPPA.	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM						
30.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kemen PPPA	Dengan adanya tugas tambahan dari Presiden untuk menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta perubahan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020, dibutuhkan penyempurnaan tata kelola pelayanan publik di Kemen PPPA guna memastikan layanan diselenggarakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan mandat dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Kementerian PANRB	2024	Luncuran tahun 2023



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.				
31.	Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Proses Bisnis	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kemen PPPA harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kemen PPPA.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2) Kementerian PANRB	2024	Luncuran tahun 2023
32.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA	Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap sistem kehadiran pegawai maka perlu dilakukan perubahan terkait pengaturan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dari unsur kehadiran.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2) Kementerian PANRB	2024	Usulan baru
33.	Peraturan Menteri PPPA tentang Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses	Terdapat beberapa ketentuan terkait pengelolaan arsip yang perlu dilakukan disesuaikan sebagai dampak dari perubahan organisasi dan tata kerja Kemen	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2024	Usulan baru



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip	PPPA. Hal ini diperlukan untuk mengurangi penumpukan arsip yang tidak diperlukan lagi dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, serta memastikan arsip yang dikelola dan disimpan merupakan arsip yang tepat dan benar.		2) Arsip Nasional Republik Indonesia 3) Sekretariat deputy di lingkungan Kemen PPPA 4) Biro di lingkungan Kemen PPPA 5) Inspektorat 6) Komisi Perlindungan Anak Indonesia		

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI